



Bupati Alex Perintahkan Inspektorat Lakukan Investigasi

Ratusan Paket Proyek Tidak Dibayar Pemerintah Sebelumnya

KETAPANG, SP - Sejumlah kontraktor mengeluhkan belum mendapat pembayaran atas proyek dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Ketapang Tahun 2024 silam, disikapi Bupati Ketapang, Alexander Wilyo SSTP MSI dengan melakukan investigasi untuk menemukan titik awal penyebab terjadinya persoalan tersebut.

"Jika memang menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Ketapang, tentu kita akan bayar sesuai mekanisme yang berlaku," tegas Bupati Alex, Rabu (19/3).

Bupati yang baru dilantik pada 20 Februari 2025 lalu ini melanjutkan, bahwa kejadian tidak terbayarnya ratusan paket proyek APBD tersebut terjadi pada akhir tahun anggaran 2024, dimana dirinya berada di luar sistem pemerintahan.

"Makanya Inspektorat perlu untuk melakukan investigasi dulu, supaya tahu masalah yang sebenarnya terjadi, sambil menunggu hasil audit BPK RI terhadap laporan keuangan Pemkab Ketapang tahun anggaran 2024," jelasnya.

Alex menerangkan, bahwa investigasi saat ini sedang dilakukan, dengan harapan benang merah terkait kejadian ini bisa diketahui siapa yang lalai. Kemudian disampaikan ke publik, supaya diketahui penyebab sebenarnya agar tidak termakan opini.

"Investigasi akan dilakukan sampai kepada perangkat daerah di tingkat teknis seperti dinas-dinas terkait yang membidangi, termasuk pihak Bank Kalbar. Jika nanti ada terbukti lalai, meskipun kejadian ini di pemerintahan sebelumnya, maka tentu akan ada sanksi," tegasnya.

Bupati Alex menambahkan, sebagai Bupati Ketapang terpilih yang baru dilantik pada akhir Februari 2025 lalu, tentu persoalan ini harusnya bisa diselesaikan pada tahun 2024 lalu. Namun nyatanya ini menjadi tantangan dari pemerintahan sebelumnya yang harus dirinya selesaikan dengan melakukan langkah-langkah sesuai aturan.

"Kita juga akan minta pendapat dari BPK RI, serta pihak terkait lain mengenai masalah ini. Jadi kita tunggu hasil investigasi dan audit ini," jelasnya.

Bupati Alex menilai, investigasi penting dilakukan agar dapat menjadi evaluasi untuk ke depan, terutama saat dirinya memimpin Ketapang agar tidak ada kejadian serupa terjadi, lantaran diakuinya persoalan seperti ini hanya memberikan dampak negatif bagi daerah.

"Kita memahami apa yang dirasakan oleh para kontraktor, maka dari itu kita mau persoalan ini selesai secara tuntas, agar tidak ada lagi kejadian seperti ini, apalagi di pemerintahan saya. Jadi kita minta untuk menunggu mekanisme yang dilakukan," tuturnya.

Untuk diketahui, dari informasi yang didapat, bahwa proyek APBD Perubahan Tahun 2024 yang belum terbayarkan mayoritas berada di Dinas Perkim-LH, khususnya di satu bidang Perkim yang terjadi pada masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang sebelumnya, Martin Rantan dan Farhan.

Bahkan ironisnya, beredar kabar bahwa ada oknum kontraktor yang belum terbayarkan mendominasi jumlah paket proyek tersebut. (*teo)